

BAB V

KESIMPULAN

Gender merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Setiap perbuatan yang didasarkan oleh perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan serta penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis akan memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal yang terjadi yakni berupa pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.

Pada masa pemerintahan Mubarak, *Equality* atau persamaan hak merupakan sebuah harapan kaum perempuan di Mesir terhadap kaum laki-laki. Karena mereka ingin dihargai dan dihormati haknya untuk dapat hidup bebas dan berkarya tanpa ada batasan. Namun, kaum perempuan Mesir sering termarginalkan dalam berbagai sektor kehidupan dan banyak kaum pria yang menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki alasan untuk mempunyai rasa peduli

sehingga terjadi *disequality* terhadap perempuan di Mesir. Dalam bidang sosial budaya, pada tahun 2008 Egyptian Center for Women's Rights yang membuktikan bahwa kurang lebih dari 80% kaum perempuan di Mesir mengalami pelecehan seksual dan sebagian besar korbannya adalah wanita muslim yang menggunakan hijab bahkan yang mengenakan sehelai kain penutup muka atau niqab, kemudian dalam dunia politik pun kaum perempuan hanya mendapatkan kesempatan kuota 20% untuk dapat menduduki kursi parlemen bagi perempuan, serta dalam dunia kerja kaum perempuan di Mesir tidak diberikan kesempatan untuk dapat melakukan pekerjaan dan tidak ada pekerjaan yang mempekerjakan kaum perempuan pada masa pemerintahan Mubarak.

Mengingat bahwa setiap manusia berhak mendapatkan haknya, maka seorang perempuan juga berhak mendapatkan haknya, karena setiap manusia diciptakan oleh Tuhan untuk berpasangan dalam gender seperti kaum laki-laki dan kaum perempuan yang mengandung makna adanya peran, tugas, dan kedudukan yang melekat masing-masing dengan melihat perbedaan yang dimiliki. Pada masa pemerintahan Mubarak rezim otoriter telah menguasai Mesir pada zaman. Sistem politik yang ada yakni sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam praktiknya kekuasaan terpusat pada presiden. Hal ini yang membuat masyarakat Mesir terutama kaum perempuan merasa terpinggirkan akan hak-haknya sehingga mereka berkontribusi dalam mendukung revolusi 25 Januari 2011 lalu.

Pasca turunnya Mubarak, terjadi pemilihan Presiden yang dimana Rakyat Mesir memilih calon dari Ikhwanul Muslimin yang merupakan sebuah organisasi agama islam yang religius dengan tujuan menyebarkan islam dan berakhlak mulia. Gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin, memiliki ideologi bahwa adalah Islam itu sendiri. Yakni, Islam yang berasal dari Allah SWT, Al Quran sebagai pedoman hidup, dan diturunkan untuk seluruh umat manusia, tanpa kecuali. Calon Presiden yang berasal dari Ikhwanul Muslimin yakni Mohamed Mursi dimana ia mengutarakan janji khususnya kepada kaum perempuan untuk dapat ikut serta dalam lingkungan eksekutif pemilihan Presiden. Kemudian, ia beranggapan bahwa kaum perempuan mesir mempunyai hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki sebagaimana kewajibannya. Mereka bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing tanpa mendapatkan diskriminasi dari penguasa sebelumnya.

Pergantian kepemimpinan di Mesir yang sebelumnya dikuasai oleh Mubarak dan saat ini dikuasai oleh Mursi menunjukkan adanya sedikit perubahan yang terjadi terhadap kaum perempuan, seperti: dalam dunia kerja kaum perempuan sudah dapat melakukan pekerjaan yakni dapat dilihat dari maskapai penerbangan Egypt Air dimana telah mengizinkan pramugarinya untuk dapat mengenakan hijab serta pembawa acara stasiun televisi yang telah mengizinkan kaum perempuan untuk bekerja dan mengenakan hijab bahkan niqab. Namun, dalam bidang politik kebebasan kaum perempuan Mesir dalam memberikan aspirasinya turun 12,7% bahkan hingga di bawah 2%. Saat ini hanya ada sekitar 10 perempuan di parlemen Mesir yang beranggotakan 508 orang. Perempuan

memiliki peran penting dalam partisipasi politik, namun peran itu tidak diwujudkan dalam partisipasi nyata dalam politik. Kemudian, dalam bidang ekonomi turun hingga 2,2% pada tahun 2012 lalu yang sebelumnya 5,1% pada tahun 2009. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut mempengaruhi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Mesir. Hal ini terjadi karena rakyat Mesir yang berpendapatan dibawah 2 Dollar sehari berada dibawah garis kemiskinan sebesar 43%, yang mempengaruhi munculnya kekerasan terhadap perempuan Mesir meningkat, seperti terjadinya pelecehan seksual yang secara nyata didepan umum dilakukan oleh kaum laki-laki yang memanfaatkan keadaan saat terjadinya demonstrasi. Tindakan pelecehan tersebut dilakukan tidak hanya berupa lisan atau sentuhan, namun sudah dalam tindakan asusila atau tindakan pemerkosaan yang dilakukan di depan umum. Kekerasan terhadap kaum perempuan semakin meningkat lebih dari 90%. Lemahnya peran undang-undang merupakan salah satu kendala sosial utama yang dihadapi perempuan. Perempuan masih mengalami diskriminasi terhadap keamanan yang berkaitan dengan keluarga, nasionalitas, hak untuk mengeluarkan aspirasi, serta hak untuk dapat hidup bebas dan layak. Serta mendapat tindakan buruk yang dilakukan oleh pasukan keamanan Mesir terhadap kaum perempuan yang mengikuti demonstrasi untuk membela hak-hak kaum perempuan.